

## Tinjauan Peran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Dalam Menunjang Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah: *Systematic Literature Review*

Aditiyanto Ekaputra<sup>1\*</sup>, Septi Rachmalia<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, Indonesia

\*Email Corresponding Author:

aditiyanto@feshum.ummada.ac.id

Receipt: 11 Juli 2025; Revision: 15 Juli 2025; Accepted: 21 Juli 2025

**Abstrak:** SIPKD merupakan aplikasi terintegrasi yang memfasilitasi seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Dalam implementasinya, SIPKD kerap menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun koordinasi antar unit kerja. Tujuan penelitian ialah untuk mengkaji peran SIPKD dalam menunjang kualitas pelaporan keuangan daerah sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan telaah literatur dengan melakukan evaluasi dan sintesis artikel berdasarkan beberapa kriteria inklusi yang ditetapkan. Hasil menunjukkan bahwa SIPKD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan namun efektivitasnya masih ditentukan oleh kesiapan teknis, kompetensi SDM, dan dukungan kelembagaan. Perlu adanya peningkatan kapasitas, infrastruktur, dan fitur aplikasi agar implementasinya berjalan optimal di seluruh daerah.

**Kata kunci:** Implementasi; Keuangan daerah; Kualitas laporan keuangan; Pengelolaan keuangan; SIPKD

**Abstract:** SIPKD is an integrated application that facilitates the entire financial management process, from planning, implementation, administration, reporting, to accountability. In its implementation, SIPKD often faces various challenges, both in terms of human resources, technological infrastructure, and coordination between work units. The purpose of this study is to examine the role of SIPKD in supporting the quality of regional financial reporting and to identify factors that influence its successful implementation. This study uses a literature review approach by evaluating and synthesizing articles based on several established inclusion criteria. The results indicate that SIPKD contributes to improving the quality of financial reports, but its effectiveness is still determined by technical readiness, human resource competency, and institutional support. Capacity, infrastructure, and application features are needed to ensure optimal implementation across all regions.

**Keywords:** Financial management; Implementation; Quality of financial reports; Regional finance; SIPKD

### PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek krusial dalam menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan transparan. Pada era digital saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan pemerintah pusat. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir sebagai preferensi teknologi informasi yang diharapkan dapat



meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan serta pelaporan keuangan daerah (Khuluq et al., 2024).

SIPKD merupakan aplikasi terintegrasi yang memfasilitasi seluruh proses pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban (Azizah et al., 2024; Annisa, 2025). Melalui penerapan SIPKD maka diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Namun demikian, implementasi sistem ini juga menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, maupun koordinasi antar unit kerja (Lutfiyah et al., 2025). Seperti kajian-kajian yang telah dilakukan oleh banyak peneliti mengenai implementasi SIPKD dalam menyusun laporan keuangan daerah.

Pratommi et al (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan SIPKD telah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut juga didukung dengan hasil riset yang lain oleh Kardina et al (2024); Saputra et al (2024); Antony et al (2025). Meski demikian, terdapat peneliti lain yang mengungkapkan bahwa penerapan SIPKD belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan kesuksesan laporan keuangan karena berbagai faktor (Khairunnas, 2021; Winarni et al., 2020). Perbedaan hasil temuan tersebut menunjukkan adanya gap riset yang signifikan dan perlu ditelaah lebih lanjut melalui kajian sistematis guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penerapan SIPKD dalam menunjang kualitas pelaporan keuangan daerah. Oleh karena itu, artikel review ini disusun untuk menganalisis berbagai hasil penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi kesenjangan temuan serta merumuskan arah penelitian lanjutan yang lebih relevan dan tepat sasaran dalam konteks pengembangan sistem informasi keuangan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran SIPKD dalam menunjang kualitas pelaporan keuangan daerah sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Pemahaman yang mendalam mengenai peran dan kendala dalam penggunaan SIPKD sangat penting untuk memberikan rekomendasi strategis dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan daerah yang pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Sistem Informasi**

Sistem informasi merupakan sistem yang dirancang untuk mengelola transaksi (harian, mingguan, bulanan, dan tahunan), dapat mendukung fungsi operasional dan manajerial, serta menunjang aktivitas strategis guna menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan selanjutnya (Pratommi et al., 2023). Pemanfaatan sistem informasi yang tepat dapat berjalan lebih efisien, karena mendukung integrasi data, mengurangi potensi kesalahan, dan mempercepat pekerjaan administratif (Kardina et al., 2024).

### **Pengelolaan Keuangan**

Pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efisien dapat berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih optimal dan tepat sasaran, sehingga mampu mendorong dalam peningkatan mutu pelayanan (Pratommi et al., 2023). Pengelolaan keuangan meliputi seluruh tahapan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan anggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta pelaporan anggaran pemerintah daerah (Kardina et al., 2024).

## SIPKD

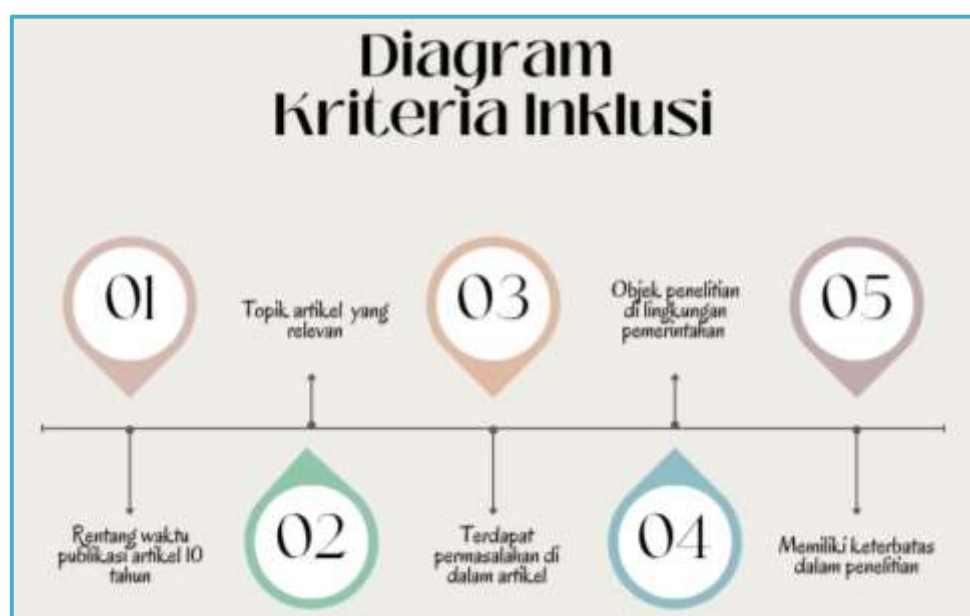
SIPKD merupakan aplikasi terpadu yang berfungsi sebagai alat bantu bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, ekonomis, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan dapat diaudit (Sutanto et al., 2018).

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Vitriana et al (2022), bahwasannya SIPKD ialah suatu sistem yang digunakan untuk menyajikan informasi terkait penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran keuangan daerah. Informasi yang disajikan meliputi neraca daerah, laporan realisasi APBD, catatan atas laporan keuangan serta laporan arus kas. Seluruh laporan tersebut disusun secara bertahap sesuai dengan karakteristik tiap daerah, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

Selanjutnya menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Saputra et al (2024), bahwa SIPKD termasuk dalam suatu sistem terintegrasi yang dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas penerapan berbagai regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah. Kinerja sistem ini diukur berdasarkan tingkat efektivitasnya, yakni sejauh mana sistem mampu menjalankan fungsi-fungsi akuntansi dan keuangan dengan baik.

## METODE

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan telaah literatur dengan melakukan evaluasi dan mensintesis dari artikel yang sesuai dengan topik. Artikel tersebut dijadikan sebagai bahan penelitian yang akan di telaah dengan kritis dan mendalam. Selanjutnya, pencarian artikel dilakukan melalui Google Scholar dengan menuliskan topik SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan. Dari pencarian tersebut diperoleh 10 artikel yang sesuai topik dan selanjutnya peneliti menetapkan beberapa kriteria inklusi sebagai skrining artikel. Berikut ini kriteria inklusi yang telah ditetapkan:



Gambar 1. Diagram kriteria inklusi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berbagai studi telah mengulas penerapan SIPKD sebagai instrumen penting dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Artikel-artikel yang direview dalam kajian ini menunjukkan bahwa SIPKD berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelaporan keuangan. Beberapa penelitian mengungkap keberhasilan implementasi SIPKD dalam mendukung proses administrasi keuangan secara lebih terstruktur, cepat, dan terdokumentasi dengan baik. Meskipun masih cukup banyak kendala dalam penerapannya seperti keterbatasan kompetensi SDM, infrastruktur teknologi yang belum memadai, serta lemahnya integrasi antar unit kerja. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengelaborasi temuan-temuan tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas SIPKD dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya dalam konteks pengelolaan keuangan pada sejumlah daerah di Indonesia.

**Tabel 1.** Hasil skrining artikel (Yusup, 2016)

<b>Topik</b>	: Menilai sejauh mana penerapan SIPKD berkontribusi terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, baik dari segi keakuratan, ketepatan waktu, transparansi, maupun akuntabilitas pelaporan.
<b>Masalah</b>	: Sebelum adanya penerapan aplikasi SIPKD masih menghadapi berbagai kendala sehingga belum dapat berjalan secara maksimal.
<b>Tujuan</b>	: Mengetahui sejauh mana pengaruh sistem informasi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
<b>Metode</b>	: deskriptif kualitatif
<b>Objek</b>	: kantor pemerintahan daerah di Kota Bandung
<b>Hasil</b>	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
<b>Keterbatasan atau saran</b>	: Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan masih perlu ditingkatkan. Individu yang menangani bidang ini hendaknya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan keuangan sehingga mampu melaksanakan tugas secara optimal dan profesional.

**Tabel 2.** Hasil skrining artikel (Saputra et al, 2021)

<b>Topik</b>	: Menilai kualitas laporan keuangan dari aspek SDM dan SPI menggunakan variabel intervening
<b>Masalah</b>	: Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima Pemerintah Daerah Kota Jambi selama periode 2008-2013 mencerminkan kurangnya kemajuan dalam pengelolaan keuangan, terutama terkait permasalahan aset yang berulang.
<b>Tujuan</b>	: Mengkaji pengaruh Kesuksesan Implementasi SIPKD sebagai Variabel Intervening terhadap Kualitas Laporan Keuangan
<b>Metode</b>	: Deskriptif kualitatif
<b>Objek</b>	: Pemerintah daerah kota jambi
<b>Hasil</b>	: SIPKD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
<b>Keterbatasan</b>	: Kualitas SDM masih kurang sehingga perlu peningkatan kompetensi. Selain itu, penelitian tersebut dilaksanakan saat pandemi COVID-19 sehingga akses peneliti di sejumlah OPD terbatas

**Tabel 3.** Hasil skrining artikel (Lotu, 2022)

<b>Topik</b>	: Mengkaji pengaruh penggunaan SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan
<b>Masalah</b>	: Penerapan SIPKD belum sepenuhnya mampu mendorong terwujudnya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas
<b>Tujuan</b>	: Mengidentifikasi pengaruh parsial penerapan SIPKD terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
<b>Metode</b>	: deskriptif kuantitatif

<b>Objek</b>	: Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
<b>Hasil</b>	: SIPKD memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan kontribusi sebesar 15%, sementara sisanya sebesar 85% dipengaruhi oleh variabel lain di luar SIPKD
<b>Keterbatasan atau saran</b>	: Kompetensi pegawai tentang penggunaan komputer perlu ditingkatkan untuk mendukung penerapan SIPKD

**Tabel 4.** Hasil skrining artikel (Khuluq et al, 2024)

<b>Topik</b>	: Implementasi SIPKD dalam penyusunan Laporan Keuangan
<b>Masalah</b>	: Meskipun pelaksanaan SIPKD sudah baik namun penggunaan aplikasi yang secara bersamaan menyebabkan proses melambat bahkan terjadi kegagalan atau error
<b>Tujuan</b>	: Mengukur efektivitas aplikasi SIPKD dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses penggunaannya
<b>Metode</b>	: Deskriptif kualitatif
<b>Objek</b>	: Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik
<b>Hasil</b>	: Implementasi SIPKD berhasil meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas laporan keuangan. Meskipun terdapat beberapa kendala namun dampak positif yang diperoleh jauh lebih signifikan
<b>Keterbatasan atau saran</b>	: Guna memaksimalkan manfaat implementasi SIPKD maka dibutuhkan peningkatan pelatihan SDM, koordinasi antar unit, serta pengembangan infrastruktur

**Tabel 5.** Hasil skrining artikel (Anthony, 2025)

<b>Topik</b>	: Implementasi SIPKD terhadap mutu laporan keuangan
<b>Masalah</b>	: implementasi aplikasi SIPKD belum berjalan secara optimal akibat keterbatasan fitur yang dimiliki,
<b>Tujuan</b>	: Mengedukasi instansi tentang pentingnya penerapan SIPKD untuk menunjang kualitas laporan keuangan (kualitas SDM, kualitas TI, kualitas penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D)
<b>Metode</b>	: Sensus
<b>Objek</b>	: Pemerintah Kota Banda Aceh (satuan kerja perangkat daerah)
<b>Hasil</b>	: Penerapan SIPKD turut mendorong peningkatan mutu laporan keuangan baik dari aspek akurasi informasi maupun ketepatan waktu penyampaian
<b>Keterbatasan atau saran</b>	: Terbatasnya fitur dalam aplikasi SIPKD menyebabkan penerapannya belum berjalan secara optimal

Hasil kajian dari lima artikel yang telah diseleksi menunjukkan bahwa penerapan SIPKD secara umum memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah. Sebagian besar studi (Anthony, 2025; Yusup, 2016; Khuluq et al., 2024; Saputra et al., 2021) sepakat bahwa SIPKD mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, ketepatan waktu serta transparansi pelaporan (Tabel 1,2,5). Misalnya pada penelitian Anthony (2025) yang meninjau bahwa SIPKD mendorong ketepatan waktu dalam penerbitan SP2D, sementara Khuluq et al. (2024) menyatakan bahwa implementasi SIPKD memberikan dampak positif yang lebih signifikan dibandingkan dengan tantangan teknis yang dihadapi selama proses penerapannya. Hal tersebut juga selaras dengan hasil penelitian lainnya yang mengungkapkan bahwa keberhasilan implementasi SIPKD masih menghadapi sejumlah tantangan. Lotu (2022) mengemukakan bahwa kontribusi SIPKD terhadap kualitas laporan keuangan hanya sebesar 15%, sedangkan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompetensi SDM (Tabel 3). Kendala teknis juga masih kerap muncul seperti yang dilaporkan oleh Khuluq et al. (2024), proses aplikasi SIPKD akan melambat bahkan *error* saat digunakan secara bersamaan (Tabel 4).

Masalah tersebut dapat muncul karena *bandwidth server* yang tidak memadai dan kurangnya fitur sistem peringatan pada aplikasi SIPKD. Selain itu, keterbatasan fitur aplikasi dan kurangnya infrastruktur (Anthony, 2025) serta rendahnya kompetensi SDM (Yusup, 2016; Saputra et al., 2021) menjadi hambatan utama dalam penerapan SIPKD yang optimal di sejumlah daerah.

Secara keseluruhan, hasil kajian ini menggambarkan bahwa penerapan SIPKD memberikan dampak positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan meskipun berbagai kendala teknis dan sumber daya masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Guna mengatasi hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan intensif, pengembangan infrastruktur teknologi yang memadai, serta pembaruan dan optimalisasi fitur aplikasi SIPKD. Tanpa upaya perbaikan tersebut, potensi sistem ini dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah akan sulit tercapai secara maksimal.

## KESIMPULAN

Meskipun SIPKD telah berperan penting dalam mendukung kualitas laporan keuangan namun efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan teknis, kompetensi sumber daya manusia, dan dukungan kelembagaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur, dan optimalisasi fitur aplikasi untuk memastikan implementasi SIPKD dapat berjalan maksimal di seluruh daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. (2025). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(3), 7619-7635. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i3.20020>.
- Anthony., Handayani, M. Eriva, C. Y., Farlian, T. (2025). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *EKOMBIS: Jurnal Fakultas Ekonomi*, 11(1), 1-11. <https://doi.org/10.35308/ekombis.v11i1.12204>.
- Azizah, M. A., Solikhin, S., & Lailiyah, N. (2024). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pelayanan Administrasi. *Ngaos: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(2), 80-94. <https://doi.org/10.59373/ngaos.v2i2.46>.
- Kardina, M., Frinaldi, A., Asnil, A., & Putri, N. E. (2024). Penilaian Penggunaan Teknologi Informasi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia. *Professional: Jurnal Komunikasi dan Administrasi Publik*, 11(2), 615-620. <https://doi.org/10.37676/professional.v11i2.7231>.
- Khuluq, K., Kamariyah, S., & Pramudiana, I. D. (2024). Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik. *Soetomo Administrasi Publik*, 2(3), 681-696.
- Lotu, M. N. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Setda Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi dan Akuntabilitas*, 10(2), 79-88. <https://doi.org/10.35508/jak.v10i2.8719>.
- Lutfiyah, R., Septriani, C. S. P., Syabilla, Y. S., & Darmansah, T. (2025). Implementasi Sistem Informasi Manajemen dan Tantangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan

- Efektivitas Operasional Kantor. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(4), 164-170. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i4.5162>.
- Pratommi, M. W., & Muhsyaf, S. A. (2023). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(4), 99-109. <https://doi.org/10.29303/risma.v3i4.955>.
- Saputra, P. M., Suhartono, E., Durya, N. P. M. A., & TAH, N. (2024). Analisis Kinerja Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Moderasi Pendidikan dan Pelatihan Pengguna. *Jurnal STIE Semarang (Edisi Elektronik)*, 16(2), 78-94. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v16i2.703>.
- Sutanto, S., Ghozali, I., & Handayani, R. S. (2018). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (Sipkd) Dalam Perspektif the Unified Theory of Acceptance and Use Of Technology 2 (Utaut 2) Di Kabupaten Semarang. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 15(1), 37-68. <https://doi.org/10.14710/jaa.15.1.37-68>.
- Vitriana, N., Agustiawan, A., & Ahyaruddin, M. (2022). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru. *Digital Business Journal*, 1(1), 64-77. <http://dx.doi.org/10.31000/digibis.v1i1.6947>.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship (e-Journal)*, 10(2), 149-160.